

Judul Artikel

**SUMBERDAYA ORGANISASI (DLHK) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN DI PROVINSI BANTEN**

Di tulis oleh:

Subki, ST

Disampaikan kepada:

**Tim redaktur/pengelola website DLHK Provinsi Banten
Kawasan pusat pemerintahan provinsi banten (KP3B)
Jl. Syech nawawi Albantani, palima Curug Kota Serang
Telp. (0254) 267 094. Web. Dlhk.bantenprov.go.id**

SUMBERDAYA ORGANISASI (DLHK) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DI PROVINSI BANTEN

Sejarah DLHK Provinsi Banten

Dalam dua dekade terakhir ini laju kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia semakin terus meningkat dan tidak menunjukkan gejala penurunan. Bila dua dekade lalu laju kerusakan hutan di Indonesia ditengarai sekitar 1 sampai 1,2 juta per tahun, kini telah mencapai 2 juta hektar per tahun. Bagai gayung bersambut, rantai kerusakan tersebut kemudian menjalar dan meluas ke sungai, danau, hutan, dataran rendah, pantai, pesisir dan laut. Pencemaran air dan udara di kota-kota besar dan wilayah padat penduduk juga telah berada pada ambang yang tidak hanya membahayakan kesehatan penduduk tetapi juga telah mengancam kemampuan pulih dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya hayati. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, dari faktor demografis, etika, sosial, ekonomi, budaya, hingga faktor institusi dan politik.

Kebijakan, rencana dan program (KRP) pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang telah diluncurkan pemerintah sejak tiga dekade lalu, tampak tak berarti atau kalah berpacu dengan kecepatan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu faktor strategis yang menyebabkan terjadinya hal ini adalah karena portofolio KRP pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diluncurkan pemerintah (KLH di Pusat, atau BLH provinsi/kabupaten/kota) cenderung terlepas atau terpisah dari KRP pembangunan wilayah dan sektor, tidak menyatu (*embedded*) atau tidak terintegrasi. Dengan kata lain pertimbangan lingkungan tidak diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan pada tahap formulasi kebijakan, rencana atau program-program pembangunan. Faktor yang kedua yang secara signifikan turut menyumbang percepatan kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah lemahnya efektifitas instrumen pencegahan dampak lingkungan pada tingkat proyek.

Keberadaan institusi Badan Lingkungan Hidup nampaknya menjadi kebutuhan dalam upaya mendorong pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menjadi lebih baik dan terencana sehingga mampu melihat dan mengatasi permasalahan yang saat ini dihadapi, maka peran institusi ini sangat penting dan strategis.

Dalam rangka menjawab tantangan dan dinamika persoalan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Banten, maka melalui PERDA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten yang kemudian direvisi menjadi PERDA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, dibentuklah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten,

kemudian direvisi lagi menjadi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, sehingga lahir **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan** yang melaksanakan penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan Provinsi Banten di Bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan.

Pembentukan lembaga ini diawali dengan dibentuknya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Banten pada tahun 2000. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala SKPD dan merupakan unsur pelaksana tugas tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Banten. Dalam mengemban tugasnya, lembaga ini pertama kali berkantor di kompleks perkantoran Gubernur Lama Jl. Brigjen K.H. Syam'un No. 5, Serang. Adapun sebagai kepala BAPEDALDA dilantik adalah Sulaeman Afandi.

Dalam menjalankan tugasnya, DLHK Provinsi Banten mengalami beberapa kali perubahan nama, antara lain :

- 🏢 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), tahun 2000-2003.
- 🏢 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), tahun 2003-2007
- 🏢 Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), tahun 2008-2016.
- 🏢 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), tahun 2017 s.d sekarang

Periodisasi Kepemimpinan

Dari tahun ke tahun DLHK (dulu Bapedalda/BLHD) Provinsi Banten juga mengalami beberapa kali Pergantian masa kepemimpinan, antara lain :

Tabel 4.1. Periode Kepemimpinan BLHD Provinsi Banten Tahun 2000 - 2017

NO	NAMA KEPALA BAPEDALDA /BLHD/DLHK PROVINSI BANTEN	PERIODE KEPEMIMPINAN
1	Sulaeman Afandi	Tahun 2000
2	Drs. H. Iyos Rosyid	Tahun 2000-2003
3	Ir. Hermin Lanjumin	Tahun 2003-2005
4	Dr. Ir. Deddy Barmawijaya	Tahun 2005-2006
5	Winaryono, MM	Tahun 2006
6	Ir. Tahir Mujahid	Tahun 2006-2007
7	Ir. Husni Hasan, CES	Tahun 2007-2008
8	Dr. Ir. H. Abdul Karimil Fatah, MM, M.Si	Tahun 2008-2014
9	H.Sutadi, ST, M.Si	Tahun 2014-2015
10	Drs. M. Natsir Azis, M.Si, M.Kes	Tahun 2015-2016
11	Ir. Husni Hasan, CES	2016 s.d sekarang

Sumber : DLHK Provinsi Banten, 2017

Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Banten mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten terdiri atas; Kepala Dinas, Sekretariat, dan 4 bidang yaitu, a) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, b) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, c) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan d) Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu untuk mendukung program dan kegiatan Dinas, dibentuk pula Unit Pelaksana Teknis dan Balai, yaitu: UPT Laboratorium Lingkungan, Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya, Balai Proteksi dan Pembenihan Tanaman Kehutanan, Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak-Tangerang, dan Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon.

Sumber Daya Manusia

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sumber Daya Manusia SKPD/OPD umumnya didasarkan pada beban kerja (tupoksi) yang diberikan, dengan klasifikasi tenaga PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga Non-PNS (kontrak). Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebanyak 171 orang dengan rincian jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural
di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No	Golongan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Esselon II	1	Kepala Dinas
2	Esselon III	9	Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Balai dan Kepala UPTD
3	Esselon IV	27	Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian
4	Fungsional	27	Penyuluh
5	Fungsional Umum	107	Pelaksana/ASN
	Jumlah	171	

Sumber: DLHK Banten, 2017

Komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten berdasarkan jabatan dan golongan, disajikan sebagai berikut:

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan
di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	4	-	-	-	4
4	Kepala Balai / UPT	4	-	-	-	4
6	Kepala Sub Bagian	1	6	-	-	7
7	Kepala Seksi	9	11	-	-	20
8	Penyuluh	9	18	-	-	27
9	Pelaksana/ASN	2	62	41	2	107
Jumlah		31	97	41	2	171

Sumber: DLHK Banten, 2017

Berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan, diperoleh bahwa total Golongan IV sebanyak 31 orang (18,13%), Golongan III sebanyak 97 orang (56,72%), Golongan II sebanyak 41 orang (23,98%) dan Golongan I sebanyak 2 orang (1,17%).

Sarana dan Prasarana

Selain itu sumberdaya manusia, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten, tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran.

Semua unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah memiliki ruang kerja dan ruang rapat yang cukup memadai. Disamping itu tersedia juga meja informasi, mushola, kantin dan area parkir yang cukup luas. Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah dilengkapi dengan sistem informasi dengan menggunakan teknologi komputer Jaringan Internet *wireless*, aringan Intranet *Local Area Network* (LAN) DLHK Provinsi Banten.

Sarana dan prasarana menjadi sangat penting untuk menunjang kinerja pegawai didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sarana dan prasarana tersebut secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yakni; barang bergerak dan barang tidak bergerak. Berikut adalah rincian sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Tabel Sarana dan Prasarana
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No	Sarana Prasarana	Jumlah (unit)	Keterangan	
			Baik	Rusak
A	Barang Bergerak			
1	Roda Empat	42	33	9

2	Roda Dua	59	45	14
3	Roda Tiga	5	5	-
B	Barang Tidak Bergerak			
1	Gedung Persemaian	3	3	-
2	Laboratorium	3	3	-
3	Gedung Pertemuan Petani	-	-	-
4	Gedung Kantor Dinas	3	3	-
5	Meja Kerja	791	457	334
6	Kursi Kantor	1173	645	528
7	Komputer	64	54	10
8	Mesin Ketik	8	8	-
9	Peralatan Laboratorium	322	167	155
10	Peralatan Gambar	2	2	-
11	Barang lainnya	3395	1755	1640

Sumber: DLHK Banten, 2017

Sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, berdasarkan kategori aset dan nilainya diestimasi mencapai 50,7 milyar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Jenis Aset dan Nilai Barang
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No	Barang/Aset	Nilai Barang	Keterangan
1	Tanah (KIB-A)	1.077.200.000	
2	Perlengkapan dan Mesin (KIB-B)	45.449.888.310	Kendaraan, Meja, Kursi, AC, PC, Printer, Laptop
3	Bangunan dan Gedung (KIB-C)	36.133.649.840	Gedung Kantor, Kantin, Kanopi Parkir, Toilet, Tempat Wudhu, Kanopi Musholah
4	Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB-D)	2.316.835.450	IPAL, Instalasi LAN
5	Aset Tetap Lainnya (KIB-E)	34.595.600	Maket Gunung Krakatau dan Badak Bercula
6	Konstruksi dalam pengerjaan (KIB-F)	2.880.773.000	Alat Pemantau Kualitas Udara
	Total	87.892.942.200	

Sumber: DLHK Banten, 2017

Berdasarkan jenis dan nilai aset/barang yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten hingga tahun 2017 adalah sebanyak 50,7 milyar dengan persentase tertinggi adalah jenis perlengkapan dan mesin yakni 27,9 milyar (55,05%) atau lebih dari setengah nilai total aset. Sedangkan persentase terendah adalah aset tetap lainnya/maket yakni 14,8 juta (0,03%) dari nilai total aset.

Sumber Referensi:

_____,2017. Laporan penyusunan Profil Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan

_____,2017. Daftar Urut Kepangkatan DLHK Provinsi Banten

_____,2017. Laporan Keuangan DLHK Provinsi Banten

Biodata Singkat Penulis

Nama : Subki, ST

Tempat, tanggal lahir : Serang, 06 Agustus 1982

Alamat : Komp. Puri Anggrek Blok D20/1 RT. 03/08 Kel. Teritih
Kec. Walantaka Kota Serang

Pekerjaan : Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten